

**PERLINDUNGAN HAK INDIVIDU DALAM MEMPEROLEH SUAKA
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN
HAK ASASI MANUSIA**

JULIYANTI / D 101 09 574

ABSTRAK

Suaka adalah suatu perlindungan yang di berikan kepada individu sebagai subjek hukum internasional yang memenuhi kriteria-kriteria menurut instrumen hukum internasional. Perlindungan terhadap hak-hak individu telah mendapat pengakuan dan jaminan dalam Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia hal tersebut diatur dalam Konvensi Tentang Status Pengungsi 1951 dan Protokolnya, Deklarasi PBB Tentang Suaka Teritorial 1967, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan lain-lain. Pada praktek negara-negara pemberian suaka berbeda satu dengan lainnya seperti Pemberian suaka terhadap Etnis Hutu dengan alasan Genosida atau pemusnahan etnis yang dilakukan oleh Etnis Tutsi, Pemberian suaka Etnis Rohingya dengan alasan diskriminasi agama dan pelanggaran HAM di Negara Asalnya serta pemberian suaka terhadap Keluarga Khadafi dengan alasan kemanusiaan karena keluarga Khadafi tidak terlibat dalam aktivitas politik Khadafi. Penolakan suaka dari praktek negara-negara suaka pun berbeda-beda seperti dalam kasus penolakan suaka Edward Snowden oleh Pemerintah Australia karena alasan ketentuan hukum Italia, dan penolakan suaka yang dilakukan oleh Pemerintah Australia terhadap nelayan Nusa Tenggara Timur, asal Indonesia dengan alasan tujuan nelayan tersebut hanya imigran ekonom yang mencari penghidupan yang layak di Australia.

Kata Kunci : Perlindungan Hak Individu, Suaka, Hukum Internasional, Hak Asasi Manusia

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara merupakan suatu kesatuan hukum yang bersifat abstrak. Ia tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sendiri, melainkan dilakukan oleh segenap organnya yang terdiri dari para individu. Individu merupakan salah satu subjek hukum internasional, Pertumbuhan dan perkembangan kaidah-kaidah hukum internasional yang memberikan hak dan membebani kewajiban serta tanggung jawab secara langsung kepada individu semakin bertambah pesat, terutama setelah Perang Dunia II¹.

Sebagai subyek hukum internasional setiap individu mempunyai hak-hak yang dilindungi dan melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi². Namun seringkali hak-hak terhadap individu tersebut diabaikan sehingga individu berada dalam rasa takut berlebihan yang mengancam keselamatan pribadi dan/atau keluarganya³.

¹Monang Padmi Nasution, *Pengantar Hukum Internasional*, <http://padmimonang.wordpress.com> diunduh tanggal 21 mei 2013 Pukul 15:00 WITA.

²Septian Bakda Tri Awanrda, *Pemahaman Tentang Hak Asasi Manusia*, <http://septiangobel.blogspot.com/2013/04/pemahaman-ham.html> diunduh tanggal 14 November 2013 pukul 14:00 WITA.

³Rani Purwanti Kemalasari, *Pemberian Suaka Berdasarkan Hukum Internasional Dikaitkan Dengan Praktek Pemberian Suaka Oleh Australia Terhadap 42*

akibatnya individu tersebut meninggalkan negaranya dan meminta perlindungan kepada negara lain yang disebut sebagai pencari suaka.

Masalah suaka berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia, Isu mengenai HAM merupakan suatu tuntutan kemanusiaan. *Universal Declaration of Human Right 1948* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) mengakui manusia sebagai individu yang menyandang status sebagai subjek hukum internasional di samping negara. Oleh karena itu, masyarakat internasional sudah sepatutnya memberlakukan HAM secara adil dan dengan cara yang sama, berdasarkan persamaan derajat dan penekanan yang sama⁴.

Australia merupakan negara tujuan terpopuler di kalangan pencari suaka dari Afghanistan, Irak, Iran, Sri Lanka dan negara-negara konflik lainnya bahkan negara tetangganya sendiri seperti Indonesia. 43 orang berkewarganegaraan Indonesia yang berasal dari Papua, bertolak dari Merauke dan akhirnya mendarat di pantai terpencil *Cape York* di Australia timur laut, alasan yang diajukan adalah hilangnya rasa aman sebab ketika memadamkan gerakan separatis militer Indonesia melakukan aksi genosida di daerah tempat tinggal mereka⁵. Departemen Imigrasi dan Masalah-masalah Penduduk Asli Australia (*Department of Immigration Multicultural and Indigenous Affairs*) memberikan Visa Tinggal Sementara atau tepatnya "*Temporary Protection Visa*" Pemerintah Indonesia menyatakan terkejut, kecewa dan sangat menyesalkan keputusan Departemen Imigrasi Australia yang telah memberikan visa tinggal sementara kepada 42 warga Papua pencari suaka⁶.

Berbeda dengan nasib sekelompok pencari suaka asal Iran dan Irak yang harus berpindah agama demi mendapat perlindungan dari pemerintah Australia. sekitar 30 manusia perahu dari Iran dan Irak yang berada dalam tahanan bersedia bertukar agama.

Para manusia perahu itu kabarnya sudah mencoba segala cara untuk mendapat suaka politik, tapi ditolak oleh pemerintah Australia. Undang-undang Australia memungkinkan para pencari suaka politik untuk ditahan tanpa batas waktu.

Tidak kurang dari 200 pencari suaka yang berada dalam tahanan Imigrasi selama lebih dari dua tahun. Hal ini mengundang kekhawatiran banyak pihak. Partai Buruh oposisi mengatakan, lamanya proses pencarian perlindungan ini memaksa para pencari suaka untuk memilih jalan pintas. Harian lokal *The Sydney Morning Herald* melaporkan, para pencari suaka ini tak mungkin kembali ke negaranya, sedangkan nasib mereka masih terkatung-katung di Australia⁷.

Nasib yang sama juga dirasakan sekelompok pencari suaka asal Sri Lanka, Myanmar dan Kuwait. Mereka tiba di Pulau Christmas Australia antara Maret 2009 dan Desember 2010 yang terdiri dari 42 orang pengungsi Tamil Sri Lanka, tiga Muslim Rohingya dari Myanmar dan seorang pencari suaka asal Kuwait yang ditahan oleh Pemerintah Australia selama lebih dari dua tahun. Australia juga membiarkan nasib mereka mengambang setelah menolak memberikan visa bagi pencari suaka.

Penahanan tanpa batas waktu yang diberlakukan Australia terhadap 46 pencari suaka yang diakui karena alasan keamanan adalah bentuk perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan, yang menimbulkan kerugian psikologis serius pada mereka⁸.

Orang Papua, Tesis, Universitas Padjajaran, Bandung, 2008, hlm., 34.

⁴Sessionid, *HAM dan Pengungsi*, Pdf, <http://repository.unhas.ac.id>, 2009, diunduh tanggal 23 Agustus 2013 pukul 18:00 WITA.

⁵Iman Prihandono, *Pemberian Suaka Oleh Negara: Kasus Pemberian Suaka Oleh Pemerintah Australia Kepada 42 Wni Asal Papua*, Skripsi, Universitas Hasanudin, Makassar, 2007, hlm., 1.

⁶*Ibid*, hlm., 3.

⁷Koran tempo, *Pemerintah Australia Fasilitas Pencari Suaka yang Berpindah Agama*, <http://koran.tempo.co>, diunduh tanggal 5 Oktober 2012 pukul 15:00 WITA.

⁸Republika News, *Isu Pencari Suaka Komite HAM PBB Kecam Australia*, <http://www.radioaustralia.net.au>, Diunduh tanggal 24 Agustus 2013 pukul 14:15 WITA.

Dua kasus diatas menunjukkan adanya perbedaan perlakuan dari sikap Pemerintah Australia terhadap pencari suaka. Para pencari suaka dari negara lain harus menunggu lama untuk memperoleh suaka dengan melalui segala proses untuk mendapatkan perlindungan dari Australia sedangkan pencari suaka asal Papua hanya menunggu dua bulan untuk memperoleh visa tinggal sementara dari Pemerintah Australia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia terhadap perlindungan hak individu dalam memperoleh suaka pada suatu negara ?
2. Apakah yang menjadi alasan bagi suatu negara dalam memberikan dan menolak individu dilihat dari praktek-praktek yang terjadi pada negara-negara?

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia terhadap Hak Individu dalam Mendapatkan Suaka Pada Suatu Negara

Ketentuan hukum internasional yang memuat persoalan suaka sampai sekarang belum terdapat instrumen internasional yang bersifat yuridis dan universal yang mengatur masalah suaka sehingga belum selarasnya persepsi negara-negara mengenai standar atau persyaratan pemberian suaka yang terkadang merupakan permasalahan negara-negara terkait praktik pemberian suaka. *Declaration On Territorial Asylum 1967* (Deklarasi PBB tentang Suaka Teritorial 1967) melalui Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 14 Desember 1967 (Resolusi 2312 (XIXII)). Dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) Deklarasi tersebut menyatakan:

1. Suaka yang diberikan oleh suatu negara, sebagai pelaksanaan kedaulatannya, kepada orang-orang yang berhak menggunakan Pasal 14 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, termasuk orang-orang yang berjuang menentang kolonialisme, harus dihormati oleh semua negara.
2. Hak untuk mencari suaka dan menikmati suaka tidak boleh digunakan oleh siapapun terhadap dirinya apabila terdapat alasan

yang serius untuk menganggap bahwa ia telah melakukan tindak pidana terhadap perdamaian, tindak pidana perang atau tindak pidana terhadap kemanusiaan, sebagaimana didefinisikan dalam instrumen-instrumen internasional yang dibuat untuk membuat ketentuan mengenai tindak pidana yang dimaksud.

Ada beberapa instrumen hukum internasional yang memuat pengaturan tentang jaminan hukum pengakuan dan perlindungan seorang individu dalam mencari suaka sebagai individu yang dilindungi dalam hukum internasional yaitu Hak seseorang untuk mencari suaka juga diakui dalam Konvensi Tentang Status Pengungsi 1951 yang mengakui adanya prinsip *Non Refoulment* yaitu larangan pengembalian paksa ke negara asal. Hal ini dapat dilihat pada pasal 33 ayat (1) :

"No Contracting State shall expel or return ("refouler") a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion."

"Tidak satu pun Negara Peserta dapat mengeluarkan atau mengembalikan seorang pengungsi dalam cara apa pun ke perbatasan wilayah apabila kehidupan atau kebebasannya terancam karena alasan rasnya, agamanya, kewarganegaraannya, keanggotaannya pada suatu kelompok sosial tertentu atau pendapat politik tertentu"

Prinsip tersebut juga termuat dalam Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia 1967 (*Convention Against Torture and Other Cruel, In Human Or Degrading Treatment Or Punishment 1967*) Pasal 3 yang menyatakan sebagai berikut:

The United States recognizes its obligation not to "expel, return ('refouler') or extradite a person to another state where there are substantial grounds for believing that he would be in danger of being subjected to torture.

“Tidak ada satu Negara Pihak pun yang boleh mengusir, mengembalikan (*refouler*) atau mengekstradisikan seseorang ke Negara lain apabila terdapat alasan yang cukup kuat untuk menduga bahwa orang itu berada dalam bahaya karena dapat menjadi sasaran penyiksaan”

Piagam PBB telah menempatkan HAM sebagai salah satu tujuannya dan bahwa kerjasama internasional perlu dimajukan untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia. Pasal 1 ayat (3) piagam PBB lebih menekankan tujuannya :

“menjaga perdamaian dan keamanan Internasional, mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa, mencapai kerjasama internasional dalam memecahkan masalah internasional di bidang karakter ekonomi, sosial, budaya, atau kemanusiaan, dan dalam memajukan dan mendorong penghormatan hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi semua tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama; dan Menjadi pusat harmonisasi tindakan negara”.

Menindaklanjuti semangat piagam PBB tersebut, maka pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum PBB menerima dan memproklamkan pernyataan umum tentang hak asasi manusia (*Universal Declaration Of Human Rights*) yang berisikan 30 pasal yang terdiri dari hak-hak fundamental dan kebebasan fundamental. Konsekuensinya, setiap negara anggota PBB baik sendiri maupun bersama-sama wajib memajukan HAM⁹. Pengakuan atas hak dan kebebasan manusia tersebut tercantum dalam pasal 2 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) :

“Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.”(Setiap orang berhak atas semua hak

dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain).”

Melalui Resolusi Nomor 2200 A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966, Majelis Umum PBB telah mensahkan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*) serta Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*Internasional Covenant on Civil and Political Rights*). Kedua kovenan internasional ini mengatur secara jelas dan rinci hak-hak yang terdapat dalam DUHAM. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya ini mulai berlaku pada Januari 1976, sedangkan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik mulai berlaku secara internasional sejak Maret 1976¹⁰.

Pelanggaran atas kedua hak inilah yang memicu timbulnya perpindahan individu dari negara asal mereka ke negara lain untuk mencari perlindungan Internasional, hal ini pun diatur dalam DUHAM pasal 13 ayat (2) *Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country* (Setiap orang berhak meninggalkan suatu negeri, termasuk negerinya sendiri, dan berhak kembali ke negerinya). Dan ditegaskan pula dalam pasal 15 ayat (1) DUHAM *Everyone has right to a nationality* (setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan).

Perpindahan individu yang sedang mencari perlindungan ke negara lain dan mendapatkan status sebagai pengungsi disebut hak untuk mencari dan mendapatkan suaka, hak ini tercantum dalam berbagai ketentuan-ketentuan internasional seperti pasal 14 ayat (1) DUHAM menegaskan bahwa *Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution*(Setiap

⁹Suparman Marzuki, *Pendidikan Kewarganegaraan Dan Hak Asasi Manusia*, UII Press:Yogyakarta, 2002, hlm., 78.

¹⁰Ahmad, *Hukum Ham Internasional Dan Nasional*, Rakaraki.blogspot.com, diunduh tanggal 04 september 2013 pukul 14:00 WITA.

orang berhak mencari dan mendapatkan suaka di negeri lain untuk melindungi diri dari pengejaran). Hak atas kebebasan ini dipertegas lagi dalam *Declaration of Territorial Asylum 1967* yang menyatakan bahwa Setiap orang memiliki hak untuk mencari dan menikmati suaka di negara lain karena kekhawatiran mengalami penyiksaan.

Apabila mengalami penyiksaan maka mereka dapat mencari perlindungan ke negara lain, hal ini sesuai dengan bunyi pasal 5 DUHAM yaitu:

"No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment (tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina)."

Sedangkan Pasal 7 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik menegaskan bahwa:

"No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. In particular, no one shall be subjected without his free consent to medical or scientific experimentation."

"Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas".

Di Indonesia, Pemerintah Indonesia mengakui hak setiap orang untuk mencari suaka di negara lain. Pengakuan ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XA, Pasal 28G, butir 2 "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain." dan juga Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 24 "Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain".

Setahun kemudian, prinsip lembaga suaka yang digariskan oleh MPR tersebut dikukuhkan sebagai ketentuan yuridis dalam

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28¹¹ yang menyatakan:

- (1) Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan non politik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Australia dan Nauru adalah dua dari 142 negara penandatangan Konvensi PBB 1951 berkaitan dengan Status dari Pengungsi dan Protokol 1967 berkaitan dengan Status Pengungsi. Untuk menaati dan menghormati perjanjian tersebut maka Australia dan Nauru mengimplementasikan ketentuan internasional tersebut dalam perundang-undangan nasionalnya. Undang-undang nasional Australia yang mengatur masalah pemberian suaka ini adalah Undang-Undang Imigrasi Australia yaitu *Immigration Act 1958* dan Nauru dalam Undang-Undang Imigrasi Nauru Nomor 6 Tahun 1999 (*Immigration Act 1999*) dan diperbaharui menjadi Undang-Undang Imigrasi Nauru Nomor 7 Tahun 2005 (*Immigration Act 2005*).

B. Alasan Suatu Negara Dalam Memberikan Dan Menolak Suaka Dilihat Dari Praktek Negara-Negara

Dibanyak belahan dunia, suaka telah membuat banyak orang menyebrang untuk menghadapi hal yang tidak terlalu menggembirakan¹² peristiwa konflik internasional maupun nasional yang melanggar HAM merupakan alasan utama timbulnya gelombang pencari suaka. berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa contoh praktek negara-negara dalam memberikan maupun menolak permohonan suaka yang sesuai dengan ketentuan hukum

¹¹Atik Krustiyati, *Penanganan Pengungsi Di Indonesia Tinjauan Aspek Hukum Internasional dan Nasional*, Penerbit Brilian Internasional: Sidoarjo, 2010, hlm., 7.

¹²Sulaiman Hamid, *Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm., 2.

internasional. Kasus-kasus tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kasus Genosida di Rwanda Pada Tahun 1994

Pembunuhan massal (genosida) yang terjadi di Rwanda pada 1994 merupakan konflik yang terjadi dari akumulasi kebencian antar etnis, yakni antara etnis Hutu dan Tutsi. Pembagian strata yang dilakukan oleh kolonial Belgia yang menempatkan etnis Tutsi untuk menempati strata tertinggi yang secara fisik dihubungkan memiliki kedekatan hubungan dengan bangsa Eropa. Pemerintah Belgia mulai melakukan diskriminasi dengan lebih memberikan perhatian pada suku Tutsi dan memberi porsi pemerintahan kepada suku Tutsi. Negara-negara yang banyak memberikan suaka yaitu Tanzania, Zambia, Ghana, dan Belgia dengan alasan Adanya rasa takut yang berlebihan disebabkan akan persekusi yang dialami pencari suaka karena alasan diskriminasi oleh ras Hutu terhadap ras Tutsi dan Kelompok Moderat Hutu.

2. Kasus Genosida Muslim Rohingya di Myanmar

Junta Militer Myanmar melakukan berbagai aksi untuk mengusir etnis Rohingya dari tanah leluhurnya, sehingga sebagian besar orang Rohingya mengungsi kenegara lain. Sedangkan bagi mereka yang tetap tinggal di Myanmar masih mengalami pelanggaran HAM. Berbagai perlakuan buruk yang diterima etnis Rohingya telah memaksa mereka meninggalkan Myanmar untuk mencari keamanan di negara lain. negara-negara yang menjadi tempat transit dan tujuan mereka antara lain: Bangladesh, Thailand, Malaysia, Indonesia dan Australia¹³. Alasan pemberian suaka yaitu Adanya rasa takut yang berlebihan disebabkan akan persekusi yang dialami pencari suaka karena alasan diskriminasi

agama oleh Junta Militer Myanmar terhadap etnis Rohingya di Myanmar.

3. Kasus Pemberian Suaka Kepada Keluarga Kadhafi

Janda dari mantan pemimpin Libya Moammar Khadafi dan beberapa anggota keluarga lainnya, diberikan suaka oleh Oman. Sebelumnya mereka tinggal di Aljazair. seluruh anggota Khadafi yang mendapatkan suaka itu, pindah dari Aljazair segera setelah pihak Oman meloloskan suaka yang diberikan kepada mereka atas dasar kemanusiaan. Pemberian suaka, menurut pejabat senior Oman, karena keluarga Kadhafi dinilai tidak terlibat dalam aktivitas politik¹⁴.

4. Kasus Penolakan Suaka Terhadap Mantan Analis Intelijen AS Edward Snowden Oleh Italia

Edward Snowden adalah whistleblower yang mengguncang dunia dengan mengungkapkan dokumen rahasia yang berisi program penyadapan dan pengawasan yang dilakukan badan intelijen AS, NSA. Buronan AS ini telah mengajukan permohonan suaka kepada 21 negara salah satunya adalah Italia, namun Italia menolak mengabulkan permohonan suaka yang diajukan oleh mantan analis intelijen AS ini karena Berdasarkan peraturan perundangan Italia pencari suaka harus datang langsung ke Kedutaan Besar Italia atau berada di wilayah Italia¹⁵.

5. Kasus Penolakan Pencari Suaka Asal NTT

Sebanyak 16 warga Desa Lunda Lusi, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur bertolak ke Australia untuk meminta suaka karena terimpit masalah ekonomi, mereka berangkat menggunakan perahu motor. Setelah melakukan pertimbangan dan penilaian pihak Australia menolak untuk memberikan visa perlindungan

¹³Tamia Dian Ayu Faniati, *Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Etnis Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan: Studi Kasus Etnis Rohingya, Myanmar*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hlm., 95-97.

¹⁴Fajar Nugraha, *Keluarga Kadhafi Diberi Suaka Oleh Oman*, www.internasional.okezone.com, diunduh tanggal 18 November 2013 pukul 20:00 WITA

¹⁵Republika News, *Italia Tolak Permohonan Suaka Snowden*, www.republika.co.id, diunduh tanggal 18 November 2013 pukul 12:00 WITA.

terhadap mereka dan mendeportasi ke-16 orang tersebut kembali ke negara asalnya¹⁶.

Berdasarkan kasus-kasus diatas dari praktek pemberian maupun penolakan suaka dapat disimpulkan bahwa hukum internasional mengakui hak negara dalam memberikan ataupun menolak permohonan suaka.pemberian suaka oleh sebuah negara merupakan pelaksanaan kedaulatan negara. Namun berbeda dengan pemberian suaka Australia terhadap pencari suaka asal papua dan penolakan suaka terhadap negara-negara timur tengah.

Pemberian suaka terhadap 42 WNI asal Papua, Australia dinilai tergesa-gesa dalam memberikan visa perlindungan tersebut tidaklah termasuk dalam kriteria sebagai pengungsi dengan pertimbangan bahwa 42 orang Papua ini tidak mengalami diskriminasi apapun baik itu ras, agama, kewarganegaraan, keagotaan dari kelompok sosial tertentu ataupun pendapat politik. Pemerintah Indonesia mengklaim bahwa tujuan utama 42 WNI asal Papua tersebut untuk mencari kehidupan yang lebih layak. Disamping itu, Komite HAM PBB mengecam keras perlakuan Australia terhadap para pencari suaka, dan menyebut Australia telah melanggar aturan HAM global dengan tidak memberikan kesempatan bagi kelompok pencari suaka ini untuk menentang proses penahanan terhadap diri mereka pada kasus pencari suaka asal timur tengah. Praktek Australia ini sangat bertentangan dengan praktek negara-negara dalam memberikan suaka pada umumnya.

Negara pemberi suaka(*state-granting asylum*) mempunyai kewenangan mutlak pula untuk mengevaluasi atau menilai sendiri alasan-alasan yang dijadikan dasar pemberian suaka, tanpa harus membuka atau menyampaikan alasan tersebut kepada pihak manapun, termasuk kepada negara asal (*origin state*) dari pencari suaka¹⁷ namun pemberian maupun penolakan suaka haruslah didasarkan

pada suatu alasan yang mendasar dan sesuai dengan aturan-aturan yang diakui oleh masyarakat hukum internasional.

Ketentuan-ketentuan tersebut terdapat dalam DUHAM, Konvensi Tentang Status Pengungsi Tahun 1951, Protokol Tentang Status Pengungsi 1967, Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Suaka Teritorial serta Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum internasional yang memuat persoalan suaka sampai sekarang belum terdapat instrumen internasional yang bersifat yuridis dan universal yang mengatur masalah suaka. Perlindungan hak individu dalam memperoleh suaka diatur dalam Konvensi Tentang Status Pengungsi 1951 pasal 33 ayat (1) yaitu larangan pengusiran dan pengembalian paksa karena alasan ras, agama, kewarganegaraan,keanggotaan pada suatu kelompok sosial tertentu atau pendapat politik tertentu. Pasal 14 ayat (1) DUHAM menegaskan bahwa setiap orang berhak mencari dan mendapatkan suaka di negeri lain untuk melindungi diri dari pengejaran dan pertegas lagi dalam *Declaration of Territorial Asylum 1967* yang menyatakan bahwa Setiap orang memiliki hak untuk mencari dan menikmati suaka di negara lain karena kekhawatiran mengalami penyiksaan. Pemerintah Indonesia mengakui hak setiap orang untuk mencari suaka di negara lain dikukuhkan dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
2. Dari Praktek negara-negara yang terjadi berbeda-beda satu dengan lainnya seperti Pemberian suaka terhadap Etnis Hutu dengan alasan Genosida atau pemusnahan etnis yang dilakukan oleh Etnis Tutsi, Pemberian suaka Etnis Rohingya dengan alasan diskriminasi agama dan pelanggaran HAM di Negara Asalnya serta pemberian suaka terhadap Keluarga Khadafi dengan

¹⁶Koran Tempo, *16 Warga NTT Cari Suaka Ke Australia*,<http://tempo.co.id>, diunduh tanggal 30 September 2013 pukul 09:15 WITA.

¹⁷Imam Prihandono, *Op. Cit.*, hlm., 11.

alasan kemanusiaan karena keluarga Khadafi tidak terlibat dalam aktivitas politik Khadafi. Sama halnya dengan penolakan suaka dari praktek negara-negara berbeda-beda seperti dalam kasus penolakan suaka Edward Snowden oleh Pemerintah Australia karena alasan aturan hukum, berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Italia Pemohon harus datang langsung ke Kedutaan Besar Italia atau berada di wilayah Negara Italia dan penolakan suaka yang dilakukan oleh Pemerintah Australia terhadap nelayan NTT asal Indonesia dengan alasan tujuan nelayan tersebut hanya imigran ekonom yang mencari penghidupan yang layak di Australia.

B. Saran

1. Perlu adanya instrumen hukum internasional yang bersifat yuridis dan universal yang khusus mengatur masalah suaka.
2. Berdasarkan praktek negara-negara, baik pemberian maupun penolakan suaka harus menghormati dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Atik Krustiyati, *Penanganan Pengungsi Di Indonesia Tinjauan Aspek Hukum Internasional dan Nasional*, Penerbit Brilian Internasional: Sidoarjo, 2010.
- Sulaiman Hamid., *Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Suparman Marzuki, *Pendidikan Kewarganegaraan Dan Hak Asasi Manusia*, UII Press: Yogyakarta, 2002.

B. Tulisan Ilmiah

- Rani Purwanti Kemalasari, *Pemberian Suaka Berdasarkan Hukum Internasional Dikaitkan Dengan Praktek Pemberian Suaka Oleh Australia Terhadap 42 Orang Papua*, Tesis, Universitas Padjajaran, Bandung, 2008.
- Iman Prihandono, *Pemberian Suaka Oleh Negara: Kasus Pemberian Suaka Oleh Pemerintah Australia Kepada 42 Wni Asal Papua*, Skripsi, Universitas Hasanudin, Makassar, 2007.
- Tamia Dian Ayu Faniati, *Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Etnis Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan: Studi Kasus Etnis Rohingya, Myanmar*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.

C. Situs-Situs Internet

- Ahmad, *Hukum Ham Internasional Dan Nasional*, Rakaraki.blogspot.com.
- Fajar Nugraha, *Keluarga Kadhafi Diberi Suaka Oleh Oman*, www.internasional.okezone.com.
- Koran Tempo, *Pemerintah Australia Fasilitas Pencari Suaka yang Berpindah Agama*, <http://www.koran.tempo.co.id>.
- Monang Padmi Nasution, *Pengantar Hukum Internasional*, <http://www.padmimonang.wordpress.com>.
- Republika News, *Isu Pencari Suaka Komite HAM PBB Kecam Australia*, <http://www.radioaustralia.net.au>.
- , *Italia Tolak Permohonan Suaka Snowden*, www.republika.co.id Sessionid, 2009, *HAM dan Pengungsi*, Pdf, <http://repository.unhas.ac.id>.
- Septian Bakda Tri Awanrda, *Pemahaman Tentang Hak Asasi Manusia*, <http://septiangobel.blogspot.com/2013/04/pemahaman-ham.html>.

BIODATA

JULIYANTI, Lahir di Maros, 20 Juli 1991, Alamat Rumah Jalan
....., Nomor Telepon +62....., Alamat Email
.....

